



BUPATIMALUKUTENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2016
MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka berdasarkan surat permohonan SKPD perihal kegiatan yang belum selesai sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 untuk dianggarkan kembali dalam Kegiatan Lanjutan mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2016 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5948);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 182);
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 266);
19. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 268);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Kegiatan Lanjutan yang dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah Kegiatan Lanjutan Tahun Anggaran 2016 yang belum terealisasi keseluruhan anggarannya.
- (2) Kegiatan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) oleh pejabat yang berwenang diproses sesuai Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 poin 22 (duapuluh dua) halaman 79 (tujuh puluh sembilan).

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-L SKPD) disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 seperti yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 16, Februari, 2017

~~BUPATI MALUKU TENGAH, ~~

~~TUASHKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 16, Februari, 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, 

UMARELLA IBRAHIM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2017

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PERUBAHAN APBD KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			
	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)	
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1. 01. 1. 01. 01. 02. 45.	Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)	-	1. 01. 1. 01. 01. 02. 45.	Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)	223.476.400	
	1. 01. 1. 01. 01. 02. 45. 5. 2. 3. 49. 01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	1. 01. 1. 01. 01. 02. 45. 5. 2. 3. 49. 01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	223.476.400	
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109.	Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Lanjutan)	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109.	Pembangunan Gedung Sekolah - Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (Lanjutan)	417.000.000	
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109.5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 109.5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	417.000.000	
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 110.	Pembangunan Gedung Sekolah (Lanjutan)	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 110.	Pembangunan Gedung Sekolah (Lanjutan)	985.608.200	
	1. 01. 1. 01. 01. 16. 110.5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	1. 01. 1. 01. 01. 16. 110.5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	985.608.200	
	1. 01. 1. 01. 01. 17. 85.	Pembangunan Gedung Sekolah(Lanjutan)	-	1. 01. 1. 01. 01. 17. 85.	Pembangunan Gedung Sekolah(Lanjutan)	79.486.250	
	1. 01. 1. 01. 01. 17. 85. 5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	1. 01. 1. 01. 01. 17. 85. 5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	79.486.250	
	Dinas Kesehatan	1. 02. 1. 02. 01. 02. 48.	Pembangunan Rumah Dinas (Lanjutan)	-	1. 02. 1. 02. 01. 02. 48.	Pembangunan Rumah Dinas (Lanjutan)	147.782.550
		1. 02. 1. 02. 01. 02. 48. 5. 2. 3. 50. 03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	-	1. 02. 1. 02. 01. 02. 48. 5. 2. 3. 50. 03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	147.782.550
1. 02. 1. 02. 01. 25. 46.		Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Lanjutan)	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 46.	Pembangunan Pagar Gedung Kantor/Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Lanjutan)	49.863.000	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 46. 5. 2. 3. 49. 06.		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 46. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	49.863.000	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 48.		Pembangunan Poskesdes (Lanjutan)	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 48.	Pembangunan Poskesdes (Lanjutan)	69.027.000	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 48. 5. 2. 3. 49. 06.		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 48. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	69.027.000	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 49.		Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Lanjutan)	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 49.	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu (Lanjutan)	86.488.500	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 49. 5. 2. 3. 49. 06.		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 49. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	86.488.500	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 50.		Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Rawat Inap (Lanjutan)	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 50.	Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Rawat Inap (Lanjutan)	465.951.200	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 50. 5. 2. 3. 49. 06.		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 50. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	465.951.200	
1. 02. 1. 02. 01. 25. 52.	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Pajak Rokok) (Lanjutan)	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 52.	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas (Pajak Rokok) (Lanjutan)	68.974.500		
1. 02. 1. 02. 01. 25. 52. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	-	1. 02. 1. 02. 01. 25. 52. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	68.974.500		

SKPD	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. 03. 1. 03. 01. 02. 48.	Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 02. 48.	Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan)	1.267.395.800
	1. 03. 1. 03. 01. 02. 48. 5. 2. 3. 49. 01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	1. 03. 1. 03. 01. 02. 48. 5. 2. 3. 49. 01.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.267.395.800
	1. 03. 1. 03. 01. 07. 08.	Peningkatan Jalan (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 07. 08.	Peningkatan Jalan (Lanjutan)	506.240.600
	1. 03. 1. 03. 01. 07. 08. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	-	1. 03. 1. 03. 01. 07. 08. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	506.240.600
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 08.	Pembangunan Jembatan (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 15. 08.	Pembangunan Jembatan (Lanjutan)	242.763.500
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 08. 5. 2. 3. 60. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	-	1. 03. 1. 03. 01. 15. 08. 5. 2. 3. 60. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	242.763.500
	1. 04. 1. 03. 01. 15. 12.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 15. 12.	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Lanjutan)	2.820.000.000
	1. 04. 1. 03. 01. 15. 12. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	-	1. 03. 1. 03. 01. 15. 12. 5. 2. 2. 23. 01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.820.000.000
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 15. 13.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Lanjutan)	25.000.000
	1. 03. 1. 03. 01. 15. 13. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	-	1. 03. 1. 03. 01. 15. 13. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	25.000.000
	1. 03. 1. 03. 01. 16. 06.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 16. 06.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Lanjutan)	6.069.200
	1. 03. 1. 03. 01. 16. 06. 5. 2. 3. 68. 02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	-	1. 03. 1. 03. 01. 16. 06. 5. 2. 3. 68. 02.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	6.069.200
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 11.	Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 18. 11.	Pemeliharaan Rutin Berkala Jalan (Lanjutan)	77.475.350
	1. 03. 1. 03. 01. 18. 11. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	-	1. 03. 1. 03. 01. 18. 11. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	77.475.350
	2. 05. 1. 03. 01. 24. 17.	Penataan RTH (Lanjutan)	-	2. 05. 1. 03. 01. 24. 17.	Penataan RTH (Lanjutan)	4.878.534.100
	2. 05. 1. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 59. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	-	2. 05. 1. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 59. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	4.521.856.500
	2. 05. 1. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 85. 01.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	-	2. 05. 1. 03. 01. 24. 17. 5. 2. 3. 85. 01.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	356.677.600
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 18.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 28. 18.	Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai (Lanjutan)	776.931.500
	1. 03. 1. 03. 01. 28. 18. 5. 2. 3. 62. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	-	1. 03. 1. 03. 01. 28. 18. 5. 2. 3. 62. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	776.931.500
	1. 03. 1. 03. 01. 30. 11.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 30. 11.	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Lanjutan)	234.384.500
1. 03. 1. 03. 01. 30. 11. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	-	1. 03. 1. 03. 01. 30. 11. 5. 2. 3. 59. 03.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	234.384.500	
1. 03. 1. 03. 01. 30. 14.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Lanjutan)	-	1. 03. 1. 03. 01. 30. 14.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Lanjutan)	13.620.000	
1. 03. 1. 03. 01. 30. 14. 5. 2. 3. 69. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	-	1. 03. 1. 03. 01. 30. 14. 5. 2. 3. 69. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	13.620.000	
Sekretariat Daerah	4. 01. 4. 01. 03. 02. 42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Lanjutan)	-	4. 01. 4. 01. 03. 02. 42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Lanjutan)	160.384.400
	4. 01. 4. 01. 03. 02. 42. 5. 2. 3. 50. 04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungaloww/Tempat Peristirahatan	-	4. 01. 4. 01. 03. 02. 42. 5. 2. 3. 50. 04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungaloww/Tempat Peristirahatan	160.384.400

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
SKPD	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)	Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp)	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	1. 06.1. 06. 02. 22. 07.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	7.000.000.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.540.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 1. 01. 04.	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	5.040.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	7.312.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	3.500.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.200.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.548.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21. 02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21. 02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	168.480.800	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21. 03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 2. 21. 03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	232.479.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 49. 10.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Pendidikan	693.000.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 59. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 59. 04.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	2.750.000.000	
	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 64. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	-	1. 06. 1. 06. 02. 22. 07. 5. 2. 3. 64. 05.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	2.961.400.200	
Sekretariat Daerah	4. 01. 4. 01. 03. 02. 46.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (Lanjutan)	-	4. 01.4. 01.03.02. 46.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas (Lanjutan)	92.235.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 02. 46. 5. 2. 3. 50. 03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	-	4. 01.4. 01.03.02. 46. 5. 2. 3. 50. 03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	92.235.000	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42.	Sumpah Janji PNS	-	4. 05.4. 05.01.30. 42.	Sumpah Janji PNS	66.990.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 06. 02.	Belanja Penggandaan	875.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 10. 07.	Belanja Sewa Sound System	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 10. 07.	Belanja Sewa Sound System	3.750.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 11. 01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 11. 01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.050.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.815.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 26. 01.	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 42. 5. 2. 2. 26. 01.	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	10.500.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59.	Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59.	Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Dokter, Dokter Gigi dan Bidan PTT	111.708.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 01. 01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.088.000	
	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 03. 12.	Biaya Jasa Penyiaran	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 03. 12.	Biaya Jasa Penyiaran	750.000	
4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	4. 05. 4. 05. 01. 30. 59. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.070.000		

BUPATI MALUKUTENGAH

TU ASHAR ABU A